

MODUL PERKULIAHAN

EKONOMI PEMBANGUNAN

Fakultas

Ekonomi dan
Bisnis Islam

Program Studi

Ekonomi Syariah

Disusun Oleh

Fatimatuzzahro, SHI., M.SEI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LEMBAR PENGESAHAN

Modul Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan :

Nama : FatimatuZZahro., SHI., M.SEI

NIP : 199508262020122007

NIDN : 2026089501

Dan digunakan untuk kalangan sendiri sebagai bahan ajar pada:

Mata Kuliah : Ekonomi Pembangunan

Semester : V

Tahun Akademik : 2021/2022

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Disahkan pada tanggal: 28 Oktober 2022

Mengesahkan:

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu S.Sos., M.Si
NIP. 197509052005012003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T. karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Diktat Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan . Diktat Mata Kuliah Ekonomi Pembangunan ini ditujukan sebagai pedoman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ketika melaksanakan perkuliahan di kampus secara luring maupun daring. Tujuan penulisan diktat kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, serta contoh-contoh praktis dan sederhana mengenai Ekonomi Pembangunan. Materi yang dibahas dalam diktat ini meliputi (1) Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan, (2) Teori-Teori Utama tentang Ekonomi Pembangunan, (3) Karakteristik Dan Persoalan Umum Negara sedang Berkembang, (4) Kemiskinan dan ukuran kemiskinan pada negara yang sedang berkembang, (5) Tahapan-tahapan Pembangunan ekonomi, (6) Indikator Keberhasilan Pembangunan, (7) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDGs), (8) Sumber dana untuk Pembangunan, (9) Perencanaan Pembangunan Nasional. Diktat ini disusun sebagai alternatif referensi untuk mendukung terwujudnya perkuliahan yang lebih efektif, isi diktat mengacu kepada kompetensi dan satuan acara perkuliahan selama satu semester yang dirancang oleh dosen pengampu. Diktat ini berisi materi, penjelasan, dan latihan soal yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa akan kemampuan memahami Ekonomi Pembangunan.

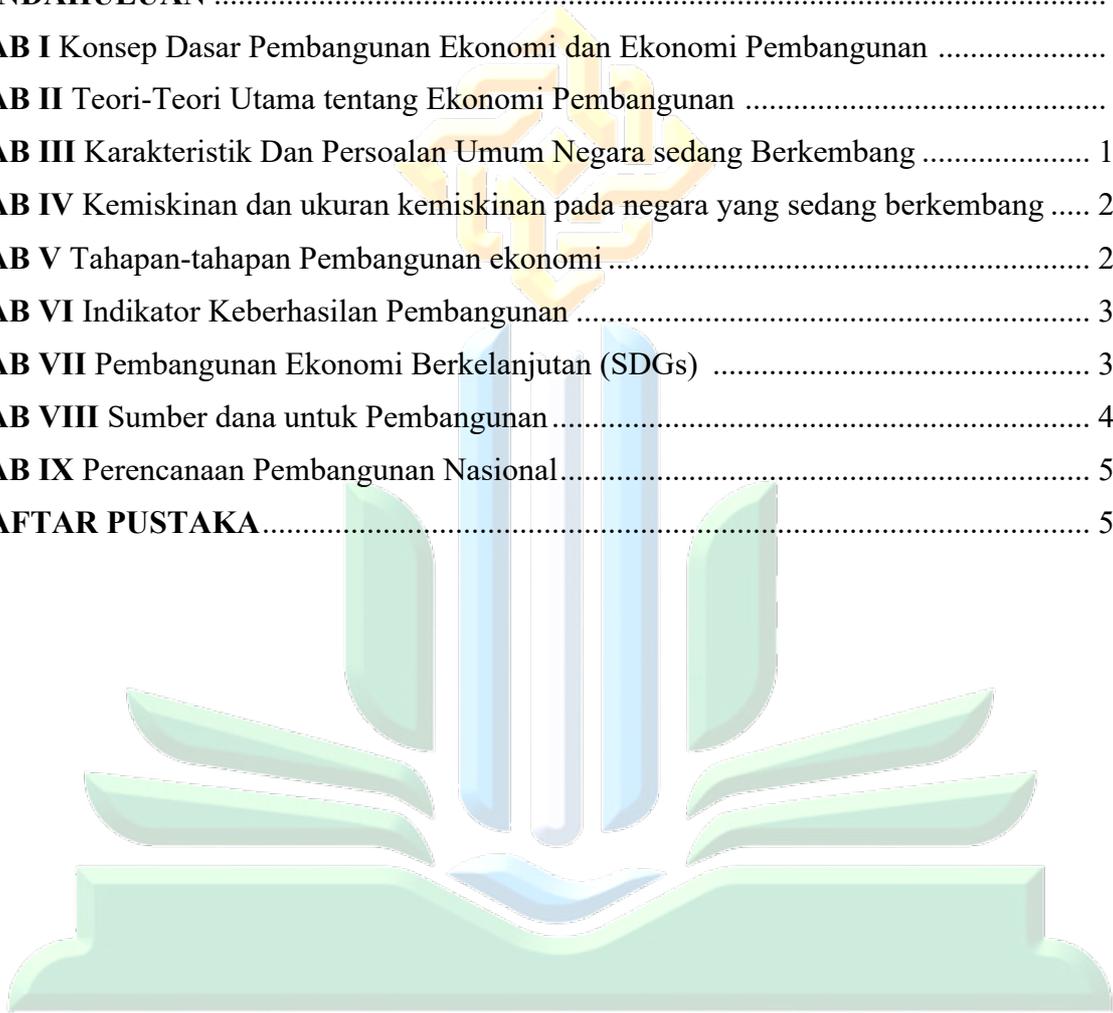
Semoga bermanfaat,

Jember, 03 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN	v
BAB I Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan	1
BAB II Teori-Teori Utama tentang Ekonomi Pembangunan	8
BAB III Karakteristik Dan Persoalan Umum Negara sedang Berkembang	16
BAB IV Kemiskinan dan ukuran kemiskinan pada negara yang sedang berkembang	24
BAB V Tahapan-tahapan Pembangunan ekonomi	29
BAB VI Indikator Keberhasilan Pembangunan	32
BAB VII Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDGs)	39
BAB VIII Sumber dana untuk Pembangunan.....	45
BAB IX Perencanaan Pembangunan Nasional.....	50
DAFTAR PUSTAKA	56



PENDAHULUAN

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini merupakan matakuliah keprodian yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai Ekonomi Pembangunan dalam konteks dunia yang kompleks dan dinamis dalam lingkungan global yang selalu berubah. Terdapat beberapa topik yang akan dibahas dalam matakuliah ini antara lain gambaran umum mengenai (1) Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan, (2) Teori-Teori Utama tentang Ekonomi Pembangunan, (3) Karakteristik Dan Persoalan Umum Negara sedang Berkembang, (4) Kemiskinan dan ukuran kemiskinan pada negara yang sedang berkembang, (5) Tahapan-tahapan Pembangunan ekonomi, (6) Indikator Keberhasilan Pembangunan, (7) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDGs), (8) Sumber dana untuk Pembangunan, (9) Perencanaan Pembangunan Nasional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

SIKAP

- S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- S.16 Menunjukkan etos kerja, rasa bangga, percaya diri dan menghargai bidang tugas menjadi praktisi ekonomi syariah

PENGETAHUAN

- P.16 Menguasai perlakuan ekonomi syariah yang meliputi pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan transaksi syariah

KETERAMPILAN UMUM

- KU.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data

KETERAMPILAN KHUSUS

- KK.3 Mampu menerapkan asumsi, prinsip-prinsip dan standar ekonomi syariah dan fiqh muamalah dalam menganalisis transaksi-transaksi syariah & peristiwa bisnis lainnya.



**BAB I KONSEP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN EKONOMI
PEMBANGUNAN**



BAB I
KONSEP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Bahan Kajian	Waktu Belajar
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Dasar Pembangunan Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Tujuan Ekonomi Pembangunan dan Ruang Lingkup	1. Definisi Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi 2. Teori Ekonomi Pembangunan 3. Ruang lingkup dan tujuan Ekonomi pembangunan	2x45 Menit

B. KONSEP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Konsep dasar pembangunan ekonomi didasarkan pada sebuah Pertumbuhan (*growth*) dan pembangunan (*development*) memiliki pengertian yang berbeda. Hal ini sudah di sadari oleh negara berkembang sejak era tahun 1960-an. Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas dan menyeluruh tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi biasanya ditunjukkan oleh produksi nasional secara keseluruhan, baik barang maupun jasa.

Setelah masa perang dunia kedua, negara berkembang sudah memulai pembangunan ekonominya, meskipun mengalami banyak ketidakberhasilan, terutama dalam menghadapi berbagai masalah seperti tidak meratanya pendapatan dan angka kemiskinan yang masih sangat tinggi. Berangkat dari ketidakberhasilan yang dialami tersebut, para ahli berusaha lebih mendalami berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan kehidupan umat manusia di dunia.

Myrdal (Kuncoro,1997) memberikan definisi pembangunan yang merupakan pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Dari pengertian tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembangunan bukan hanya melibatkan aspek ekonomi, namun aspek-

aspek lain dari seluruh sistem sosial. Fokus perhatian pembangunan ekonomi melibatkan seluruh aspek yang terkait dan menjadi bahan analisis para ahli ekonomi.

Saat ini ekonomi pembangunan menjadi salah satu cabang ilmu yang penting dan menarik untuk dibahas, terutama terkait permasalahan yang dijumpai dalam proses pembangunan yang terjadi di negara dunia ketiga. Ilmu ekonomi memiliki dimensi yang luas, dan ekonomi pembangunan bukan merupakan cabang ilmu baru dalam ilmu ekonomi. Para ahli ekonomi klasik telah membahas berbagai aspek pembangunan dalam berbagai tulisan mereka. Jadi, ekonomi pembangunan bukanlah ilmu ekonomi yang baru saat ini dianalisis oleh para ahli. Analisis-analisis yang muncul pada saat ini merupakan bentuk perhatian para ahli ilmu ekonomi terhadap perkembangan pembangunan ekonomi di negara-negara terutama negara berkembang, dan sebagai kelanjutan dari analisis-analisis terdahulu yang pernah diutarakan oleh para ekonom.

Ilmu ekonomi pembangunan membahas berbagai pandangan dan pendapat ahli ekonomi mengenai berbagai unsur yang saling mempengaruhi terkait dengan pembangunan yang berlangsung di negara berkembang, termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi. Pola analisis yang seragam seperti yang ditemui dalam analisis makro ekonomi, belum dapat kita jumpai pada analisis ekonomi pembangunan. Kondisi tersebut dikarenakan ekonomi pembangunan memiliki cakupan bahasan yang lebih luas dibandingkan cabang ilmu ekonomi lainnya.

Aspek-aspek yang ekonomi pembangunan yang menjadi bahan analiasa (Arsyad, 1999) diantaranya :

- a. Permasalahan ekonomi dan pertumbuhannya.
- b. Permasalahan pembentukan modal
- c. Permasalahan pengerahan tabungan
- d. Permasalahan bantuan luar negeri

Dari semua aspek yang disebutkan diatas belum ditemukan titik temu dari para ekonom mengenai aspek yang memiliki peran paling dominan dalam pembangunan ekonomi dan mekanisme yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar yang berlaku umum dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi (Arsyad, 1999). Ekonomi pembangunan dapat dibagi menjadi dua kelompok bahasan menurut Arsyad (1999), yaitu :

- a. Kelompok pertama bersifat deskriptif dan analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara sedang berkembang, serta implikasi sifat-sifatnya guna menyiapkan program untuk membangun ekonomi di kawasan tersebut.
- b. Kelompok kedua bersifat memberikan berbagai pilihan kebijakan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang.

Dari dua macam pengelompokan tersebut, pada akhirnya analisis ekonomi pembangunan dapat didefinisikan sebagai “suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi (Sadono Sukirno, 1990).

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, usaha-usaha serta hambatan yang dihadapi, dan kebijakan-kebijakan yang diambil yang kesemuanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan pendapatan perkapita masyarakat dalam jangka panjang.

Dari pengertian tersebut maka dapat dilihat bahwa di dalam pembangunan ekonomi terdapat tiga hal yang penting diantaranya :

1. Perubahan secara terus menerus merupakan sesuatu hal yang lumrah dan harus terjadi dalam suatu proses pembangunan ekonomi.
2. Tujuan pembangunan ekonomi adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dimana pendapatan perkapita menjadi tolok ukurnya adanya pertumbuhan ekonomi
3. Kenaikan pendapatan perkapita tersebut diharapkan berlangsung dalam jangka Panjang untuk melihat pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan (Todaro, 1997). Pendapat para ekonom yang menganalisa masalah-masalah pembangunan di negara berkembang tersebut yang disebut dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan belum memiliki pola analisis seragam yang disepakati oleh para ekonom seperti pola

analisis yang terdapat dalam ekonomi mikro dan makro. Belum adanya keseragaman mengenai pola analisis pembangunan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Kompleksitas, cakupan masalah yang luas, dan banyaknya faktor yang mempengaruhi ekonomi pembangunan antara lain masalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal, pengalihan tabungan, dan hutang luar negeri. Kompleksitas tersebut menyebabkan sulitnya mencari pola analisis yang seragam.
2. Belum ada teori-teori pembangunan yang dapat menjadi pijakan dan kerangka dasar untuk menggambarkan pola pembangunan ekonomi.

Pemikiran-pemikiran awal yang muncul mengenai pembangunan cenderung pada upaya meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan kenaikan pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan kemiskinan yang banyak dijumpai di negara-negara berkembang dapat terselesaikan. Hal tersebut dapat terlihat dari pemikiran-pemikiran yang dicetuskan oleh Leibenstein, W.W. Rostow, Harrod-Domar, Nurkse, Arthur Lewis, dan Rosenstein Rodan.

Pemikiran selanjutnya mengenai pembangunan tidak hanya semata-mata menaikkan tingkat pendapatan perkapita, namun juga memperhatikan aspek-aspek kualitatif dari proses pembangunan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas menjadi suatu hal yang harus menjadi fokus perhatian dalam pembangunan, tidak sekedar menjadikan GNP sebagai prioritas dalam tujuan pembangunan (Kuncoro, 2003).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang dimana tersedia banyak barang-barang pemuas kebutuhan, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan. Dari kehidupan yang menyenangkan tersebut diharapkan timbul rasa perikemanusiaan dan membantu sesama. Kemudian pada akhirnya pembangunan ekonomi juga diharapkan dapat mengikis jurang perbedaan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju.

C. RUANG LINGKUP EKONOMI PEMBANGUNAN

Secara umum, ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih cepat.

Menurut pakar ekonomi pembangunan asal Indonesia Lincolin Arsyad, ekonomi pembangunan adalah bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Sedangkan, pembangunan ekonomi adalah suatu usaha dalam perekonomian guna mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat dan berkembang, taraf pendidikan serta teknologi semakin maju. Kemudian definisi pembangunan ekonomi menurut beberapa ahli ekonomi diantaranya :

1. Adam Smith, Menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri
2. Schumpeter, menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah perubahan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terputus.
3. Sadono Sukirno, menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah proses untuk meningkatkan pemasukan atau pendapatan perkapita suatu negara dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi riil.
4. Simon Kuznets, menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam barang.

Sejak Adam Smith mengeluarkan bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*, para ahli Ekonomi mulai melanjutkan penyelidikan mengenai perkembangan ekonomi suatu negara. Analisis tentang perkembangan ekonomi suatu negara dipelajari oleh suatu ilmu yang diberi nama Ekonomi Pembangunan (*Development Economics*). Menurut Sadono Sukirno (1985), Ekonomi Pembangunan didefinisikan sebagai suatu cabang Ilmu Ekonomi, yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah

yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu, agar negaranegara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Berdasarkan definisi di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dari analisis ekonomi pembangunan adalah untuk: 1. Menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan atau ketiadaan pembangunan di negara-negara sedang berkembang. 2. Mengemukakan cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PEMBANGUNAN EKONOMI

Semua negara yang ada di dunia ini, baik negara maju maupun negara sedang berkembang selalu melaksanakan pembangunan ekonomi. Tujuan negara-negara tersebut mengadakan pembangunan ekonomi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. menaikkan produktivitas;
- b. menaikkan pendapatan per kapita.

Namun, bagi negara sedang berkembang, tujuan dari pembangunan ekonomi pada prinsipnya adalah dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sehingga setaraf dengan tingkat hidup negara-negara maju.

Dengan adanya pembangunan ekonomi, ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun perekonomian antara lain adalah: a. Output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. b. Kebahagiaan penduduk akan bertambah, karena pembangunan ekonomi dapat menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan dilihat dari sudut material atau dapat diartikan kemakmuran. Asumsi yang digunakan bahwa seseorang yang lebih banyak kesempatan untuk memiliki sesuatu barang/jasa secara lahiriah, akan lebih Bahagia.

E. LATIHAN SOAL

Agar lebih memperdalam pemahaman saudara mengenai materi diatas, kerjakanlah Latihan berikut ini :

1. Diskusikan dengan teman saudara apakah perlunya mempelajari ekonomi pembangunan !

2. Jelaskan mengenai konsep dasar dari ketiga istilah yaitu ekonomi, pembangunan, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi!
3. Jelaskan mengenai tujuan dan manfaat ekonomi pembangunan!



BAB II TEORI-TEORI UTAMA TENTANG EKONOMI PEMBANGUNAN

EKONOMI PEMBANGUNAN



BAB II

TEORI-TEORI UTAMA TENTANG EKONOMI PEMBANGUNAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Bahan Kajian	Waktu Belajar
Mahasiswa mampu menjelaskan Teori-teori utama tentang Ekonomi Pembangunan	1. Teori-Teori Utama Ekonomi Pembangunan 2. Teori pertumbuhan Ekonomi	2x45 Menit

B. TEORI-TEORI UTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI

Suatu teori diperlukan untuk memberikan penjelasan secara sederhana mengenai gambaran situasi yang sesungguhnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka teori ekonomi pembangunan dibuat oleh para ahli dalam rangka menjelaskan mengenai variabel-variabel apa yang terkait dan turut berkontribusi terhadap kenaikan output perkapita dalam jangka panjang di suatu masyarakat atau negara dan bagaimana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain dalam suatu proses pembangunan. Jadi, teori ekonomi pembangunan berusaha untuk mengungkapkan secara logis dan sistematis mengenai variabel-variabel yang terkait dengan pembangunan tersebut bekerja dan bagaimana proses pembangunan itu sendiri dapat terjadi. Banyak teori-teori mengenai ekonomi pembangunan sehingga sulit untuk dikelompokkan, oleh karena perbedaan periode lahirnya teori-teori tersebut serta gagasan-gagasan yang ingin disampaikan oleh penggagasnya. Namun pengelompokan sejatinya menjadi suatu keharusan untuk memudahkan kita mempelajari dan menganalisa ide-ide dan gagasan-gagasan yang ada dari pengelompokan tersebut. Maka, Todaro (Kuncoro, 2000) berusaha mengkasifikasikan teori-teori yang ada melalui 4 macam pendekatan. Berikut ini beberapa teori ekonomi pembangunan yang pernah ada dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dalam

pengambilan kebijakan dan penyusunan strategi pembangunan khususnya di negara-negara berkembang.

1. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap pertumbuhan yang berurutan dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan terakhir adalah tahap perindustrian. Berdasarkan teori ini pertumbuhan masyarakat dimulai dari masyarakat tradisional menuju tahap masyarakat modern yang kapitalis. Lewat analisa tersebut Adam Smith beranggapan bahwa tenaga kerja adalah salah satu unsur yang berperan dalam suatu kegiatan menghasilkan barang atau produksi. Pembagian kerja secara khusus menjadi bahasan pokok dalam analisa tersebut dalam rangka meningkatkan output yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Teori ini yang kemudian dikenal sebagai spesialisasi kerja menurut Adam Smith. Spesialisasi tersebut melibatkan faktor-faktor lain yang ikut berperan dalam pencapaian target yaitu peningkatan ketrampilan kerja dan penemuan alat-alat produksi yang dapat mengurangi pemborosan energi para pekerja.. Pengkhususan tugas yang dilakukan tersebut dapat terlaksana pada fase dimana sistem perekonomian yang dilakukan adalah sistem kapitalis dan modern. Hasil yang didapat akan terlihat signifikan dan terjadi secara serentak, dimana terdapat sinergi satu sama lain menurut Adam Smith. Penambahan hasil yang terlihat pada satu bagian akan mendorong terjadinya peningkatan investasi, meningkatkan spesialisasi, ditemukannya teknologi yang lebih modern, dan ekspansi wilayah penjualan.

Proses pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan dimana pada akhirnya terkendala oleh sumber daya alam yang ada dan terbatas. Pada akhirnya proses pertumbuhan itu sendiri akan mengalami perlambatan pada saat sumber daya alam tidak lagi tersedia untuk suatu aktivitas ekonomi yang harus terus berjalan sementara sumber daya yang ada sudah menipis bahkan lama kelamaan habis.

2. Teori Pembangunan Karl Marx

Proses perubahan perkembangan masyarakat dikemukakan oleh Karl Marx pada karyanya yang masyhur yaitu Das Kapital. Dalam buku tersebut disebutkan tiga tahap perubahan di dalam masyarakat yang dimulai dengan tahap feodalisme yang masih sangat tradisional, kemudian berubah menjadi kapitalisme, dan pada ahirnya adalah yang dikenal sebagai sosialisme. Perubahan yang berlangsung secara berangsur-

angsur di dalam masyarakat tersebut akan berjalan seiring dengan pembangunan dan kemajuan yang dihasilkan. Pada masa tradisional situasi masyarakat masih sangat memprihatinkan dengan berjalannya sistem feodal. Pada tahap ini kalangan bangsawan sebagai pemilik tanah-tanah rakyat menduduki posisi tawar menguntungkan dibandingkan pelaku ekonomi lainnya. Sama halnya dengan tahap feodalisme, pada tahap kapitalisme ada pihak yang memiliki posisi tawar yang menguntungkan yaitu para pengusaha dibandingkan pelaku ekonomi lainnya terutama buruh. Karl Marx memiliki pandangan bahwa buruh hanya sebagai masukan (input) dalam proses produksi sehingga berada pada situasi yang kurang menguntungkan terutama di hadapan majikan yang berpaham kapitalis. Akibatnya buruh hanya dimanfaatkan tenaganya dan menjadi korban eksploitasi besar-besaran para majikan. Pemupukan modal akhirnya menjadi kata kunci untuk meningkatkan pendapatan pada waktu selanjutnya.

Bersamaan dengan penggunaan alat-alat produksi modern terjadi, para pelaku usaha berpikir untuk menginvestasikan modal yang diperolehnya dengan membeli mesin-mesin yang bersifat padat capital dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Pemakaian mesin pada proses produksi mengakibatkan tenaga manusia tidak dibutuhkan lagi sehingga mengakibatkan pengangguran. Kondisi ini mendorong para pekerja dalam hal ini buruh mengadakan gerakan untuk keluar dari situasi yang sangat tidak menguntungkan tersebut. Pada tahap ini akhirnya melahirkan sistem sosial selanjutnya yang disebut sistem masyarakat sosialis. Revolusi yang terjadi melahirkan perubahan signifikan pada setiap lini kehidupan masyarakat, yang paling mendasar adalah mengenai aturan dalam hal kepemilikan sumber daya dan cara-cara yang digunakan dalam produksi itu sendiri. Pemupukan investasi yang diberlakukan pada masyarakat sosialis beralih ke pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya. Masyarakat yang semula bersifat individualistis dan materialistis beralih ke sistem tatanan masyarakat sosialis.

Teori pembangunan yang digagas oleh Karl Marx memiliki argumen dengan asumsi bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Kelompok orang yang memiliki tanah dan tidak memiliki tanah
- 2) Kelompok orang yang memiliki modal dan tidak memiliki modal

Asumsi Karl Marx tersebut didasarkan perbedaan kelas dan konflik yang terjadi di masyarakat, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antar kelompok kelas di masyarakat.

Kritik yang ditujukan kepada Karl Marx adalah mengenai asumsi adanya nilai lebih dalam suatu perekonomian, dimana diharuskannya suatu sistem bermasyarakat yang baru secara cepat menjadi masyarakat sosialis dengan meninggalkan sistem yang lama. Pendapatnya ini justru memberikan sumbangan terhadap kelanggengan kehidupan perekonomian kapitalis.

3. Teori Tahap-tahapan Pertumbuhan Rostow

Rostow memperkenalkan teori-teori tahap pertumbuhan pada pertengahan tahun lima puluhan dan tercantum dalam bukunya yang diluncurkan tahun 1960. Karya Rostow tersebut dikenal dengan judul *The Stages of Economic Growth : a non-communist manifesto*. Rostow berpendapat bahwa setiap negara akan melalui tahap-tahap berikut sesuai dengan proses pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung, yaitu :

1) Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional digambarkan Rostow sebagai masyarakat yang masih melakukan produksi dengan cara-cara yang tergolong sangat terbelakang, baik dalam penggunaan alat maupun proses produksi yang dikerjakannya. Struktur masyarakat masih sangat sulit untuk berkembang karena terbatasnya faktor-faktor pendukung produksi seperti pengetahuan yang masih sangat minim dan sikap masyarakat yang ditunjukkan. Mengenai sikap masyarakat tersebut dapat dipahami bahwa pada masyarakat tradisional cara berpikir sebagian besar masyarakat masih dipengaruhi oleh hal-hal mistis dan tidak masuk akal yang merupakan warisan budaya leluhur mereka.

Ciri-ciri masyarakat tradisional menurut Rostow adalah sebagai berikut:

- a. Hampir seluruh masyarakat mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilannya. Dalam kegiatan pertanian yang berlangsung tersebut hasil produksi yang dihasilkan masih sangat rendah , baik secara keseluruhan maupun hasil produksi masing-masing individunya.
- b. Cara pandang masyarakat dalam menilai seseorang masih sangat dipengaruhi oleh hubungan darah dan status sosial masyarakat tersebut yang berlangsung secara turun temurun. Rasa kesukuan masih sangat kental di dalam

masyarakat, sehingga kemungkinan untuk meningkatkan penghidupan sangat kecil sekali terutama dalam bidang pertanian.

- c. Kalangan bangsawan yang menguasai kepemilikan tanah di daerah- daerah sangat mempengaruhi setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Bidang politik masih terdapat sentralisasi.

2) Prasyarat lepas landas

Fase ini sangat menentukan perkembangan ekonomi hingga ke fase berikutnya, karena pada fase ini masyarakat harus menyiapkan diri sendiri atau dibantu oleh pihak luar untuk meraih suatu titik yang nantinya akan menjadi penopang untuk bergerak terus secara berkesinambungan. Setelah melewati fase ini maka kegiatan pembangunan ekonomi serta pertumbuhan yang diharapkan akan lebih mudah untuk dilakukan secara serta merta. Pada tahap ini terdapat dua model tahapan yaitu :

- a) Masyarakat tradisional yang sudah berlangsung secara turun temurun harus dirubah secara paksa. Hal ini dicapai oleh negara-negara di Afrika, Timur Tengah, Asia Timur, dan Eropa.
- b) Mencapai fase ini tanpa merubah struktur masyarakat yang sudah berlangsung lama yang oleh Rostow disebut sebagai born free. Negara-negara tersebut adalah Selandia Baru, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat.

Tahap prasyarat lepas landas adalah tahap peralihan menuju tahap lepas landas. Untuk ini sektor pertanian sangat diperlukan dalam tahap ini untuk :

- a) Menjamin tersedianya bahan pangan bagi pertambahan penduduk.
- b) Dengan makin maraknya industri di perkotaan maka harus tersedia bahan baku yang cukup untuk menjamin stok makanan bagi penduduk kota.
- c) Industrialisasi harus ditunjang oleh sektor pertanian yang mapan.
- d) Ekspansi wilayah penjualan barang-barang industri.
- e) Pengenaan pajak terhadap sektor pertanian, sehingga pertanian ikut serta menjadi sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.
- f) Investasi pemerintah harus tercipta untuk mendorong kegiatan sektor industri.

3) Tahap Lepas Landas

Fase ini berlangsung dengan perubahan yang terjadi pada sektor investasi yang mengalami peningkatan dan perubahan-perubahan lainnya. Dengan bertambahnya investasi dapat mendorong perluasan kesempatan sektor usaha dan industri yang pada akhirnya menambah pendapatan nasional. Dengan bertambahnya penerimaan negara yang melebihi laju pertumbuhan penduduk, akan meningkatkan pendapatan masyarakat perkapita. Adapun ciri-ciri tahap lepas landas adalah sebagai berikut :

- a) Investasi yang semula kurang dari 5% meningkat menjadi 10% dari total produk nasional neto dan disalurkan pada sektor yang semestinya.
- b) Sektor industri berkembang dengan sangat pesat pada satu atau beberapa sektor.
- c) Segera tercapainya satu kerangka politik, sosial, dan institusional yang diperlukan untuk menciptakan :Pertumbuhan dan perluasan di berbagai sektor modern, Potensi eksternalitas ekonomi yang diakibatkan oleh tahap lepas llandas sehingga diharapkan pertumbuhan akan terus menerus berlangsung.

4) Gerak Menuju Kematangan

Fase ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi-teknologi modern yang ada pada kebanyakan sumber daya yang ada dan tersedia. Pada fase ini industri permulaan sudah berhasil dilampaui dengan baik.

Pada fase ini pertumbuhan ekonomi bergerak terus meskipun dengan laju pertumbuhan yang berubah-ubah, kadang naik kadang turun (fluktuatif). Pada tahap gerak menuju kematangan ini perekonomian tumbuh dengan teratur dan terjadi perluasan pemakaian teknologi yang sudah moderb secara menyeluruh dalam setiap sektor perekonomian. Tahap ini juga ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru mengakibatkan tertinggalnya industri-industri yang sudah lama. Keadaan ini memungkinkan kenaikan output yang lebih tinggi dari pertambahan penduduk, karena pemakaian mesin-mesin baru yang lebih modern. Barang-barang yang sebelumnya diimpor, pada tahap ini sudah dapat diproduksi di dalam negeri sendiri.

5) Tahap Konsumsi Masa Tinggi

Pada tahap ini Rostow menyebutkan adanya persaingan di dalam masyarakat dalam mendapatkan sumber daya-sumber daya yang ada serta dukungan politik. Persaingan tersebut terjadi dengan tiga macam tujuan sebagai berikut :

- a) Adanya tujuan memperlebar pengaruh dan wilayah kekuasaan ke negara lain sehingga cenderung untuk melakukan penaklukan.
- b) Sistem pajak progresif dimana semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin besar pajak yang dikenakan diharapkan dapat menciptakan lebih meratanya pendapatan di dalam masyarakat, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- c) Merubah tingkat konsumsi masyarakat dari semula hanya mengkonsumsi barang kebutuhan utama menjadi konsumsi barang mewah dan tahan lama.

Arsyad (1993) mengatakan, bahwa belum diterimanya teori ekonomi pembangunan secara luas dan baku dikarenakan luasnya cakupan analisis. Objek analisis pembangunan ekonomi merupakan suatu kajian konsep yang sangat luas. Oleh karena beragamnya pemahaman tentang ekonomi pembangunan tersebut, Hess dan Ross (1997) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan satu konsep yang rumit untuk didefinisikan dan diukur dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi semata. Terlepas dari kontroversi pemahaman tentang teori ekonomi pembangunan, suatu hal yang pasti bahwa komponen pokok dalam analisis ekonomi pembangunan mencakup indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pembentukan modal, pengerahan tabungan, serta bantuan luar negeri. Secara terperinci, Blackman et al. (2004) mengelompokkan materi-materi dalam kajian ekonomi pembangunan ini ke dalam delapan aspek pokok, yaitu:

1. Peran pemerintah,
2. Pertumbuhan (ekonomi),
3. Perdagangan dan industrialisasi,
4. Hubungan antara negara (bantuan, perdagangan dan utang),
5. Penyesuaian struktur dan stabilisasi,
6. Perubahan penduduk,
7. Perkembangan ekonomi, serta
8. Tujuan dan strategi pembangunan.

C. LATIHAN SOAL

Agar lebih memperdalam pemahaman saudara mengenai materi diatas, kerjakanlah Latihan berikut ini :

1. Jelaskan perbedaan teori Pertumbuhan Adam Smith dan teori pembangunan Karl Marx?
2. Jelaskan mengenai Teori Tahap-tahapan Pertumbuhan Rostow?
3. Jelaskan mengenai Kajian ekonomi pembangunan?

**BAB III KARAKTERISTIK DAN PERSOALAN UMUM NEGARA
SEDANG BERKEMBANG**

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB III

KARAKTERISTIK DAN PERSOALAN UMUM NEGARA SEDANG BERKEMBANG

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Bahan Kajian	Waktu Belajar
Mahasiswa mampu menjelaskan Karakteristik dan persoalan umum Negara sedang Berkembang	1. Ciri-ciri umum pembangunan ekonomi di negara berkembang 2. Permasalahan dan persoalan umum Negara sedang berkembang	2x45 Menit

B. CIRI-CIRI PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG

Negara yang sedang berkembang juga disebut sebagai negara-negara Dunia Ketiga. Indikator secara kasar belum berkembangnya suatu negara dapat dilihat dari kondisi pada umumnya, seperti keadaan miskin, tingkat hidup penduduk masih rendah, rumah-rumah penduduk masih sederhana, dan sebagian besar penduduk pendidikannya masih rendah. Dengan kata lain, negara-negara sedang berkembang pada umumnya merupakan negara yang masih miskin.

Ciri-ciri umum negara yang sedang berkembang menurut M. Meier dan RE. Baldwin, ada enam macam, yakni:

1. Produsen Barang-barang Primer

Produksi dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yakni produksi primer, sekunder dan tersier. Produksi primer adalah kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan yang umumnya masih berupa bahan makanan dan bahan dasar atau bahan-bahan mentah. Kegiatan yang dilakukan dalam sektor produksi primer antara lain bercocok tanam,

mengambil hasil hutan, menangkap ikan yang umumnya masih menggunakan teknologi yang sederhana. Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya sebagai produsen barang-barang primer, yakni menghasilkan bahan makanan dan bahan-bahan mentah. Sebagian besar penduduk di negara sedang berkembang bekerja di sektor pertanian, karena itu tidak mengherankan jika sebagian besar pendapatan nasional berasal dari sektor pertanian. Pada umumnya sebagian besar penduduk di negara-negara sedang berkembang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pengetahuan dan keterampilannya masih terbatas. Karena itu, barang-barang yang dihasilkan oleh industri di negara ini masih merupakan bahan-bahan mentah atau bahan dasar. Sedangkan yang dimaksud produksi sekunder adalah kegiatan ekonomi yang meliputi industri-industri pengolahan, industri air dan listrik, dan industri bangunan. Dalam produksi sekunder, kegiatan yang dilakukan tidak hanya mengambil barang-barang hasil alam, melainkan berupa pengolahan sehingga menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih tinggi, misalnya menghasilkan barang-barang setengah jadi ataupun barang jadi. Produksi sekunder ini memerlukan teknologi yang sudah maju, pengetahuan dan keterampilan penduduk yang lebih tinggi. Karena itu, penduduk di negara sedang berkembang yang bekerja di sektor produksi sekunder pada umumnya masih relatif sedikit. Pengertian dari sektor produksi tersier adalah kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, antara lain meliputi pelistrikan, pengangkutan, perhubungan, perbankan, kesehatan dan perdagangan. Mengingat tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian besar penduduk di negara-negara sedang berkembang masih rendah, maka sudah sewajarnya jika sebagian besar penduduknya bekerja di sektor produksi primer dan hanya sebagian kecil penduduk yang bekerja di sektor produksi sekunder maupun tersier.

2. Sumber-sumber Alam Belum Dikembangkan

Sumber-sumber alam yang terdapat di negara-negara sedang berkembang pada umumnya belum dikembangkan secara optimal, belum banyak diusahakan dan juga belum banyak dimanfaatkan. Sumber-sumber alam tersebut antara lain berupa berbagai bahan tambang, flora dan fauna, dan kekayaan alam lainnya baik yang terdapat dalam bumi, air dan udara. Sebagian besar sumber-sumber alam ini masih merupakan sumber yang potensial, dan

belum dapat menjadi sumber yang riil. Untuk mengubah sumber alam yang potensial menjadi sumber alam yang riil diperlukan modal yang cukup besar, teknologi yang tinggi serta tenaga ahli. Padahal, negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya menghadapi kekurangan modal, teknologi dan tenaga ahli.

3. Menghadapi Tekanan Penduduk

Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya menghadapi tekanan di bidang kependudukan berupa tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan beban ketergantungan, sehingga menyebabkan bertambahnya pengangguran dan perlunya penyediaan lapangan kerja. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 7,324,782,225 jiwa atau bertambah 1.1182% dari tahun sebelumnya yang diperkirakan sebesar 7,243,784,121 jiwa. Data ini berdasarkan hasil laporan dari Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang prospek penduduk dunia yang memperkirakan jumlah penduduk dunia dengan metode medium fertility mengingat adalah tidak mungkin menghitung penduduk dunia secara tepat dalam suatu periode tertentu. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 sebesar 255,708,785. Dilihat dari tingkat kelahiran, di negara-negara yang sedang berkembang sangat tinggi yakni antara 35-40 setiap 1000 penduduk, sedangkan tingkat kelahiran penduduk di negara maju ternyata kurang dari setengahnya. Demikian juga tingkat kematian yang terjadi. Di negara-negara yang sedang berkembang tingkat kematian penduduk relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di negaranegara maju. Namun demikian, karena adanya usaha peningkatan kesehatan dan pengawasan terhadap berbagai penyakit menular, maka perbedaan tingkat kematian antara negara yang sedang berkembang dengan negara maju lebih kecil dibandingkan dengan perbedaan tingkat kelahiran. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya sekitar 2%, sedangkan di negara-negara maju kurang lebih 0,6%.

4. Penduduk yang masih tertinggal

Merupakan kondisi penduduk yang masih tertinggal dibandingkan dengan kondisi penduduk di negara-negara yang sudah maju. Keterbelakangan atau ketertinggalan penduduk di negara-negara sedang berkembang dapat diketahui antara lain dari aspek pendidikan, standar hidup yang masih rendah

atau tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan. Tingkat pendidikan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, pada umumnya masih rendah dan bahkan angka buta huruf masih relatif tinggi. Tingkat pendidikan penduduk di negara-negara yang sedang berkembang dapat digambarkan seperti bentuk piramida, yakni sebagian besar penduduk berpendidikan rendah, maka pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya terbatas, karena itu kualitas tenaga kerja penduduk di negara yang sedang berkembang dapat dikatakan relatif rendah.

5. Kekurangan Kapital atau Modal

Modal merupakan komponen dari pembangunan yang sangat penting. Modal atau kapital dapat berupa mesin-mesin dan peralatan maupun berupa modal uang. Tersedianya modal uang dalam jumlah yang cukup dapat digunakan untuk melakukan investasi, dalam bentuk pengadaan mesin-mesin maupun pembangunan industri dan sejenisnya. Namun, di negara sedang berkembang pada umumnya tingkat investasi masih rendah. Kurangnya investasi disebabkan oleh rendahnya tingkat tabungan masyarakat sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan. Rendahnya penghasilan disebabkan oleh rendahnya produktivitas tenaga kerja, modal, tanah dan sumber alam lainnya. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan ataupun karena keterbelakangan penduduk. Kemiskinan dan kekurangan kapital di negara-negara sedang berkembang dapat dipandang sebagai “lingkaran yang tidak berujung pangkal” atau “vicious circle”. Tidak berujung pangkal karena sulit untuk menemukan apa yang menjadi sebab dari akibat-akibatnya, melainkan keduanya dapat menjadi penyebab sekaligus sebagai akibat. Hal ini nampak dalam gambaran berikut. Adanya kekurangan kapital disebabkan oleh rendahnya pendapatan. Rendahnya pendapatan ini disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh rendahnya investasi. Kurangnya investasi ini disebabkan oleh rendahnya tabungan yang terjadi. Kurangnya tabungan ini disebabkan oleh kurangnya modal atau kapital sebagai akibat rendahnya pendapatan yang dihasilkan.

6. Berorientasi Perdagangan Luar Negeri

Suatu negara sekalipun memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah, tetap saja negara tersebut tidak dapat hidup menyendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan negara lain. Suatu negara tidak mungkin dapat

membuat atau menghasilkan barang-barang yang diperlukannya hanya dari produk dalam negeri. Tanpa bantuan negara lain, negara yang bersangkutan tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu perwujudan kerjasama antar negara di bidang ekonomi adalah saling mengadakan jual beli barang-barang yang dihasilkan melalui perdagangan luar negeri. Saat ini semua negara saling mengadakan perdagangan luar negeri, atau mengadakan kegiatan ekspor dan impor. Kita memahami semua bahwa suatu negara menghasilkan barang-barang tidak hanya untuk mencukupi konsumsi dalam negeri saja, melainkan sebagian dijual ke luar atau diekspor. Pendapatan yang diterima dari ekspor tersebut digunakan untuk membeli barang-barang atau peralatan, mesin-mesin yang dibutuhkan dalam negeri yang sementara ini belum dapat diproduksi sendiri. Setiap negara memiliki jenis kekayaan atau sumber daya yang berbeda-beda. Ada yang kaya bahan tambang, kaya hasil hutan, tanahnya subur dan sebaliknya. Ada negara yang memiliki laut, tapi ada pula negara yang tidak memiliki lautan. Demikian juga iklim dan cuaca masing-masing negara tidak selalu sama. Akibat semua ini, barang-barang yang dihasilkan masing-masing negara juga tidak sama. Karena itu, mereka perlu mengadakan perdagangan luar negeri, sehingga kekurangan barang yang diperlukan dapat dicukupi dari negara lain.

C. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN UMUM NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Bagi negara sedang berkembang, pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, agar setaraf dengan tingkat hidup di negara maju. Namun kenyataannya menunjukkan, bahwa sampai perang dunia kedua negara-negara sedang berkembang taraf hidupnya masih ketinggalan jauh, apabila dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Ada tiga permasalahan dasar yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Tiga permasalahan dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya ketidakmerataan pendapatan.
2. Kemiskinan.
3. Gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang.

Titik perhatian utama permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang adalah distribusi pendapatan atau kekayaan (assets) yang tidak merata, namun perlu diketahui bahwa ketidakmerataan pendapatan di atas, hanyalah merupakan bagian kecil dari permasalahan ketidakmerataan yang lebih luas yang dialami di negara sedang berkembang. Permasalahan ketidakmerataan yang lebih luas tersebut meliputi ketidakmerataan kekuasaan, status, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan memilih, kebebasan mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Cara yang sederhana untuk mendeteksi masalah distribusi pendapatan adalah dengan menggunakan kerangka analisis kemungkinan produksi.

Dengan demikian untuk negara sedang berkembang di mana tingkat GNP, dan pendapatan per kapitanya rendah, serta semakin timpang distribusinya maka permintaan agregat akan semakin dipengaruhi oleh perilaku konsumsi orang-orang kaya. Oleh karena itu, posisi produksi dan konsumsi adalah pada titik A, di mana lebih banyak barang mewah yang dihasilkan daripada barang kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan karena orang kaya biasanya proporsi pengeluarannya lebih banyak untuk barang mewah daripada barang kebutuhan pokok. Hal inilah yang menyebabkan di negara sedang berkembang kelompok miskin akan semakin menderita. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, menurut Irma Adelman & Cynthia Taft Morris (1973) adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antardaerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga prosentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan prosentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usahausaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat

ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.

8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Permasalahan pokok yang kedua adalah kemiskinan. Pada tahun 1990 yang lalu, perhatian masyarakat terhadap masalah kemiskinan kembali dibicarakan, setelah cukup lama tidak diperbincangkan di media massa. Perhatian tersebut berawal dari pernyataan Bank Dunia (1990), di media massa yang memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurut Bank Dunia, Indonesia telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin secara relatif dari 40% pada tahun 1976 menjadi 22% dari jumlah populasi pada tahun 1984. Hal ini merupakan suatu penurunan yang cukup besar, karena hanya dalam kurun waktu 8 tahun dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 18%. Sementara itu, menurut data dari Biro Pusat Statistik (1991), jumlah penduduk miskin Indonesia tinggal 15% dari jumlah populasi pada tahun 1990. Menurut para ahli (antara lain Andre Bayo Ala, 1981), kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut, termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Oleh karena itu, kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktifitas dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, kemiskinan ini dapat ditimbulkan oleh dua hal, yaitu:

1. Kemiskinan yang bersifat alamiah atau kultural, dan

2. Kemiskinan yang disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, yang biasa disebut dengan kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo Sumardjan, 1980). Sedangkan kemiskinan alamiah atau kultur adalah kemiskinan yang disebabkan karena suatu negara tersebut memang miskin. Jadi suatu negara itu secara alamiah memang sudah miskin. Penyebab kemiskinan yang bersifat alamiah ini biasanya disebut dengan lingkaran yang tak berwujud pangkal atau lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circles*). Yang dimaksud dengan lingkaran perangkap kemiskinan (*vicious circles*) adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

D. LATIHAN SOAL

Agar lebih memperdalam pemahaman saudara mengenai materi diatas, kerjakanlah Latihan berikut ini :

1. Jelaskan permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang!
2. Sebutkan faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang!

**BAB IV KEMISKINAN DAN UKURAN KEMISKINAN PADA NEGARA
YANG SEDANG BERKEMBANG**

BAB IV
KEMISKINAN DAN UKURAN KEMISKINAN PADA NEGARA YANG SEDANG BERKEMBANG

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Bahan Kajian	Waktu Belajar
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Kemiskinan, macam-macam kemiskinan, indikator, ukuran kemiskinan dan strategi dalam mengentaskan kemiskinan pada negara sedang berkembang	1. Teori Kemiskinan pada negara sedang berkembang 2. Ukuran kemiskinan pada negara sedang berkembang	2x45 Menit

B. TEORI KEMISKINAN PADA NEGARA SEDANG BERKEMBANG

Kemiskinan adalah rendahnya taraf kehidupan suatu masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun yang berada di daerah perkotaan. Kemiskinan merupakan rendahnya nilai tatanan kehidupan di suatu daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang menyangkut masalah moral, materil maupun spirituil. Kemiskinan tidak hanya diartikan dalam segi ekonomi saja tetapi juga harus mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Definisi kemiskinan yang mencerminkan kondisi riil yaitu menyangkut kemungkinan orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya,

C. MACAM-MACAM KEMISKINAN

Kemiskinan Menurut penyebabnya a. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang terjadi karena keadaan alam yang miskin atau langka, sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah. b. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena alokasi sumber daya yang tidak terbagi secara merata. Apabila total produksi yang dihasilkan dapat dibagi secara merata, maka tidak akan terjadi kemiskinan. Kemiskinan Secara Konsep yaitu : a. Kemiskinan subjektif, yaitu apabila setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara absolut ataupun relatif sebenarnya tidak tergolong miskin. Dengan kata lain individu melakukan perbandingan antara "needs dan wants". b. Kemiskinan absolut adalah seseorang (keluarga) yang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk memelihara kondisi fisiknya secara efisien. c. Konsep kemiskinan relatif berkaitan dengan konsep relative deprivation atau posisi relatif seseorang terhadap anggota masyarakat lain terhadap kemampuan pemenuhan kebutuhan. Konsep ini berkaitan erat dengan ketimpangan pendapatan.

D. INDIKATOR KEMISKINAN

Menurut kriteria BPS, 2020, rumah tangga dikatakan miskin jika:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
- 8) Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik.

- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,- per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga termasuk dalam kategori miskin.

Indikator lain, seseorang atau keluarga dapat dikategorikan miskin apabila memenuhi indikator di bawah ini:

- a) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
- b) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- c) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d) Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
- e) Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- f) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- g) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak telantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

E. MENGUKUR KEMISKINAN DI NEGARA BERKEMBANG

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

F. KONSEP STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM EKONOMI ISLAM

Qardhawi (2002) menggagas konsep pengentasan kemiskinan yang bertumpu pada instrumen: (1) bekerja, (2) jaminan dari famili dekat yang mampu, (3) zakat, (4) jaminan negara dari berbagai sumbernya, (5) hak-hak selain zakat, (6) derma suka rela/filantropi. Selain itu dalam gagasannya Qaradhawi juga memberikan gagasan mengenai solusi untuk mengatasi hambatan bagi orang fakir-miskin yang kesulitan untuk menjalankan aktivitas pengentasan kemiskinan dengan bekerja. Qaradhawi mensyaratkan agar gagasan ini dapat bekerja maka masyarakat dan negara harus menjalankan syariat Islam secara kaffah (menyeluruh). Namun penulis beranggapan bahwa sebenarnya kendati masyarakat dan negara belum menjalankan syariat Islam secara menyeluruh konsep dari Qaradhawi masih dapat diimplementasikan meski tidak

semuanya. Pengimplementasian yang terhambat mungkin hanya dari segi jaminan negara dari segala sumbernya, mengingat yang dimaksud Qaradhawi di sini adalah jaminan melalui perbehandaraan negara yang memiliki sumber penghasilan seperti fa'i, ghanimah, jizyah yang saat ini mungkin sudah tidak didapati lagi sumber perbehandaraan seperti itu. Baidhawiy (2009) menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui 3 hal pokok yakni merevitalisasi peran negara, menegakkan daulat masyarakat, dan penguatan institusi keluarga. Negara menurut Baidhawiy harus menegakkan keadilan ekonomi politik melalui kerjasama multilateral, menyusun berbagai regulasi pro-masyarakat miskin dan pro-syariat yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, menghidupkan tanah mati untuk dibuat lahan pertanian atau usaha yang lain agar dapat menambah lapangan pekerjaan dan mendukung proses pengentasan kemiskinan, menghentikan eksploitasi SDA demi kepentingan publik dan masyarakat miskin. Kemudian menegakkan kedaulatan masyarakat melalui jalur politik, ekonomi, dan kebudayaan. Serta yang tidak kalah penting adalah menguatkan institusi keluarga dengan menanamkan nilai islami berupa sikap konsumsi sederhana dan proporsional.

G. LATIHAN SOAL

Agar lebih memperdalam pemahaman saudara mengenai materi diatas, kerjakanlah Latihan berikut ini :

1. Jelaskan mengenai macam-macam kemiskinan ?
2. Jelaskan mengenai indikator kemiskinan?
3. Jelaskan mengenai cara mengukur kemiskinan?

BAB V TAHAPAN-TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB V
TAHAPAN-TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Bahan Kajian	Waktu Belajar
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Tahapan-tahapan Pembangunan Ekonomi	1. Teori tentang tahapan-tahapan pembangunan ekonomi	2x45 Menit

B. TAHAPAN-TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Fokus utama sebuah negara dalam melaksanakan pembangunan adalah peningkatan kemampuan ekonomi warga negaranya. Teori tentang tahap-tahap pembangunan ekonomi dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu Frederich List, Bruno Hilderbrand, Karl Bucher dan W.W Rostow. Untuk dapat memahami dari masing-masing ahli Anda pelajari uraian berikut:

1) Teori Fredrich List

Sebagai penganut paham *Laissez faire*, Fredrich List berpendapat bahwa paham *Laissez faire* dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal, meskipun proteksi bagi industri-industri yang masih lemah tetap dibutuhkan. Fredrich List berpendapat bahwa perkembangan ekonomi suatu negara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah: 1. Peranan pemerintah 2. Organisasi-organisasi swasta 3. Lingkungan kebudayaan masyarakat Menurut List, perkembangan ekonomi hanya akan terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Ia menyusun tahap-tahap perkembangan ekonomi dimulai dari: 1. Fase primitif biadab 2. Fase pertanian 3. Fase pertanian dan pabrik 4. Pabrik dan perdagangan Selain itu, menurut List perkembangan industri hanya cocok untuk negara yang

berhawa sedang. Hal ini dikarenakan, negara tersebut memiliki kepadatan penduduk yang sedang akan tetapi memiliki pasar yang cukup luas. Kegiatan di sektor pertanian sudah efisien, sehingga sebagian penduduk dapat dipindahkan ke sektor industri. Dengan demikian, standar hidup penduduk sektor pertanian menjadi tinggi dan siap untuk menampung hasil sektor industri. Menurut List, apabila suatu bangsa memiliki berbagai sumber alam, maka lebih baik bangsa tersebut mengeksploitasi bahan-bahan mineral. Perkembangan sektor industri adalah untuk perkembangan ekonomi, meskipun pada awalnya diperlukan proteksi yang cukup tinggi. Sedangkan pertanian, paling cocok dikembangkan di negara beriklim tropis. Hal ini mengingat bahwa jumlah penduduk di negara tropis relatif lebih besar. Selain itu, pengembangan sektor pertanian yang belum efisien menjadikan negara ini tidak cocok untuk pengembangan sektor industri.

2) Teori Bruno Hilderbrand

Bruno Hilderbrand ini mengkritik pendapat dari Friedrich List. Ia lebih condong pada pengalaman-pengalaman yang terdapat di Inggris. Ia mengatakan bahwa perkembangan ekonomi itu bukan terjadi karena sifat-sifat produksi atau konsumsi seperti yang disampaikan oleh Friedrich List, melainkan lebih ditekankan pada metode distribusi yang digunakan. Oleh karena itu, Bruno Hilderbrand mengemukakan bahwa tahap-tahap pembangunan/perkembangan ekonomi itu menjadi 3 tahap yaitu: a. Perekonomian barter atau perekonomian natural b. Perekonomian uang c. Perekonomian kredit Akan tetapi, Bruno Hildebrand tidak menjelaskan bagaimana tahap-tahapan tersebut berkembang menuju tahap selanjutnya.

3) Teori Karl Bucher

Karl Bucher ini mencoba mensintesis pendapat List dan Hilderbrand. Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi melalui tiga tingkat atau tahap yaitu: a. Produksi untuk kebutuhan sendiri. b. Perekonomian kota, yaitu terjadinya pertukaran yang semakin meluas. c. Perekonomian nasional, dimana peranan pedagang-pedagang menjadi semakin penting. Menurut tahap ketiga ini, bahwa barang-barang itu diproduksi untuk pasar bukan untuk kepentingan sendiri. Tahapan yang dikemukakan Karl Bucher diatas merupakan gambaran evolusi yang terjadi di negara Jerman.

4) Teori W.W. Rostow

Salah satu teori tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi yang paling banyak mendapat perhatian dan komentar adalah teori tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi yang dicetuskan oleh W.W. Rostow. Teori ini pada mulanya dikemukakan sebagai suatu artikel dalam “Economic Journal” dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul “The stages of economic growth”.

Menurut Rostow, proses perkembangan/pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap negara dapat digolongkan ke dalam salah satu tahap dari kelima tahap perkembangan ekonomi tersebut. Kelima tahap perkembangan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow adalah:

1. Masyarakat tradisional (the traditional society).
2. Masyarakat prasyarat untuk lepas landas (precondition for take-off).
3. Masyarakat lepas landas (take-off).
4. Masyarakat menuju kedewasaan/kematangan (the drive to maturity).
5. Masyarakat konsumsi yang berlebihan (high mass consumption).

Untuk melengkapi teorinya tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi, Rostow telah menerbitkan pula suatu buku yang berjudul “Politics and the Stage of Economic Growth”. Analisis yang dikemukakan oleh Rostow tentang perkembangan ekonomi, berbeda dengan analisis yang dikemukakan oleh Kuznets dan Chenery tentang perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Teori Rostow tentang tahap-tahap perkembangan ekonomi ini lebih luas. Tetapi analisisnya lebih bersifat umum dibandingkan dengan ketiga analisis yang telah dibahas di atas, dimana teorinya tidak secara rinci menganalisis corak perubahan yang terjadi pada suatu sektor dalam proses pembangunan.

C. LATIHAN SOAL

Agar lebih memperdalam pemahaman saudara mengenai materi diatas, kerjakanlah Latihan berikut ini :

1. Jelaskan perbedaan teori tahapan pembangunan menurut Frederich List, Bruno Hilderbrand, Karl Bucher!
2. Jelaskan tahap perkembangan ekonomi menurut Rostow!



BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

EKONOMI PEMBANGUNAN



BAB VI

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Bahan Kajian	Waktu Belajar
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang indikator keberhasilan Pembangunan	1. Deskripsi Indikator keberhasilan pembangunan	2x45 Menit

B. INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara diperlukan tolok ukur dengan indikator sesuai dengan definisi dari ekonomi pembangunan itu sendiri. Hal ini supaya pembangunan ekonomi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Indikatornya adalah tingkat pendapatan harus seimbang dengan pengeluaran dan harus seimbang pula dengan tingkat produksi, indikator tersebut diharapkan mampu mewakili atau merupakan model dari semua aspek atas pembangunan ekonomi.

Indikator merupakan sesuatu yang memberikan kunci untuk pemahaman kompleks atau masalah yang lebih penting, bisa membuat jelas suatu kecenderungan atau fenomena yang tidak segera terdeteksi. Mendefinisikan, mengukur, membandingkan dan menganalisis indikator perkotaan untuk keberlanjutan dan kualitas hidup sangat penting untuk memahami kota perencanaan dan proses manajemen. indikator tersebut adalah alat penting untuk menghadapi tantangan untuk memperbaiki kota-kota kita, terutama dengan mengetahui seberapa baik atau buruk kita hidup. Penggunaan indikator dan variabel pembangunan akan berbeda-beda untuk setiap negara. Di negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-

faktor sekunder dan tersier. Sejumlah indikator ekonomi yang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita, Gross National Product/GNP atau Gross Domestic Product/GDP, Indeks Kualitas Hidup (IKH) serta Indeks Pembangunan Manusia.

C. INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PARADIGMA BARU

Indikator pembangunan ekonomi dalam paradigma baru ada tiga indikator yaitu :

1. Teori Kualitas Hidup

Kondisi sejahtera menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur, kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan sosial. Bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai tinggi rendahnya tingkat hidup pada suatu masyarakat. Oleh karena itu kemudian diciptakan suatu metode untuk dapat mengetahui indikator kesejahteraan sosial, diantaranya adalah indeks kualitas hidup secara fisik atau PQLI (*Physical Quality of Life Index*), indeks kemajuan sosial (*The Index of Social Progress*) dan yang terbaru adalah indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. Model terakhir inilah yang menjadi populer di berbagai negara termasuk di Indonesia sebagai suatu alat untuk mengukur pembangunan manusia. Setiap individu memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung dari bagaimana cara mereka menyikapi permasalahan yang terjadi dalam dirinya. Jika menghadapinya dengan positif maka akan baik pula kualitas hidupnya, tetapi lain halnya jika menghadapinya dengan negatif maka akan buruk pula kualitas hidupnya. Kualitas hidup adalah konsep yang lebih luas daripada produksi ekonomi dan standar hidup. Kualitas hidup mencakup sekumpulan penuh faktor-faktor yang memengaruhi apa yang kita hargai dalam hidup ini, melampaui sisi materialnya. Kualitas hidup adalah perbedaan antara keinginan yang ada dibandingkan perasaan yang ada sekarang. Pernyataan ini dikenal dengan sebutan “Calman’s Gap”. Calman mengungkapkan pentingnya mengetahui perbedaan antara perasaan yang ada dengan keinginan yang sebenarnya. Contohnya dengan membandingkan suatu keadaan antara “di mana seseorang berada” dengan “di mana seseorang ingin berada”. Jika perbedaan antara kedua keadaan ini lebar, ketidakcocokan ini menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang tersebut rendah. Sedangkan kualitas hidup tinggi jika perbedaan yang ada antara keduanya kecil.

Beberapa pendekatan fenomenologi dari kualitas hidup menekankan tentang pentingnya persepsi subjektif seseorang dalam memfungsikan kemampuan mereka sendiri dan membandingkannya dengan standar kemampuan internal yang mereka miliki agar dapat mewujudkan sesuatu menjadi lebih ideal dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup adalah penilaian individu terhadap posisi mereka di dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup dalam kaitannya dengan tujuan individu, harapan, standar serta apa yang menjadi perhatian individu. Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011) mengajukan tiga pendekatan konseptual untuk mengukur kualitas hidup, yaitu : a. **Pendekatan pertama**, yang dikembangkan erat dengan riset psikologis, dipijakkan pada gagasan tentang kesejahteraan subjektif. Pendekatan ini terkait erat dengan tradisi utilitarian, yang menyatakan bahwa upaya manusia untuk ‘bahagia’ dan ‘puas’ dengan hidup mereka merupakan tujuan universal eksistensi manusia. b. **Pendekatan kedua** berakar pada gagasan tentang kapabilitas. Pendekatan ini melihat hidup seseorang sebagai kombinasi antara berbagai ‘kegiatan dan kedirian’ (functionings) dan kebebasannya untuk memilih di antara fungsi-fungsi tersebut (capabilities). Dasar pendekatan kapabilitas ini memiliki akar kuat pada ide filosofis mengenai keadilan sosial. Hal ini mencerminkan manusia akan fokus pada tujuan dan menghargai kemampuan individu untuk mengejar dan merealisasikan tujuan yang dia yakini, serta memainkan peran prinsip-prinsip etis dalam merancang masyarakat yang ‘baik’. c. **Pendekatan ketiga**, yang dikembangkan dalam tradisi ilmu ekonomi, didasarkan pada gagasan tentang alokasi yang adil. Dasar pemikirannya adalah menimbang berbagai dimensi non-moneter kualitas hidup (melampaui barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar) dengan suatu cara yang menghargai preferensi seseorang.

Kemudian Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011) menyebutkan ada beberapa bidang yang terkait dengan kualitas hidup, diantaranya yaitu : kesehatan, pendidikan, aktivitas personal, hak suara politik dan tata kelola pemerintahan, koneksi sosial, kondisi lingkungan, serta ketidakamanan pribadi. Karena penelitian oleh ketiga ahli tersebut terkait dengan pendidikan, maka penulis hanya akan membahas pendidikan. Terkait dengan pendidikan, Stiglitz, Sen & Fitoussi mengatakan bahwa pendidikan penting bagi kualitas hidup, terlepas dampaknya pada pendapatan dan produktivitas masyarakat, dimana masyarakat yang lebih terdidik pada umumnya memiliki status kesehatan yang lebih baik, pengangguran yang lebih sedikit, koneksi sosial yang lebih

banyak, dan keterlibatan yang lebih besar dalam kehidupan sipil dan politik. Indikator pendidikan meliputi beragam bidang. Beberapa mengacu pada input (tingkat pendaftaran sekolah, anggaran pendidikan, dan sumber daya sekolah), sementara yang lain mengacu pada output (tingkat kelulusan, lamanya tahun bersekolah, pengukuran berbasis tes standar atas tingkat melek huruf dan melek angka). Dari indikator-indikator ini yang ada, indikator yang mana lebih relevan bergantung pada taraf pembangunan suatu negara dan pada tujuan proses evaluasi itu sendiri. Sebagian indikator yang paling relevan untuk mengkaji dampak pendidikan terhadap kualitas hidup adalah ukuran kompetensi seseorang, yang mengukur pendidikan dan outcome lain yang penting bagi kualitas hidup di tingkat individu.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar. Ketiga bidang tersebut yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam modul ini sesuai dengan metode yang digunakan The United Nations Development Programme (UNDP) dalam menghitung HDI (Human Development Index). Untuk memperoleh angka IPM, pertama-tama perlu dihitung dulu indeks untuk ketiga komponen yang telah dijelaskan di atas. Untuk menghitung indeks usia hidup, pendidikan, dan PDB, maka dipilih nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen.

Perhatikan tabel berikut :

INDIKATOR	NILAI MAKSIMUM	NILAI MINIMUM
Angka harapan hidup saat lahir (thn)	85	25
Angka melek huruf orang dewasa (%)	100	0
Angka partisipasi kasar gabungan (%)	100	0
PDB per kapita (PPP US\$)	40000	100

Performa ketiga peubah tersebut dinyatakan sebagai suatu nilai antara 0 dan 1 berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata indeks-indeks dimensi ketiga komponen tersebut. Penjelasan langkah-langkah dan perhitungan komponen tersebut adalah :

- 1) Hitung indeks panjang usia, sebagai ukuran prestasi relatif suatu negara dalam hal harapan hidup saat lahir.
- 2) Hitung indeks pendidikan, sebagai ukuran prestasi relatif suatu negara baik dalam hal melek huruf orang dewasa maupun gabungan angka partisipasi sekolah di tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Langkah-langkah untuk menghitung, pertama hitung indeks melek huruf orang dewasa, kemudian indeks gabungan partisipasi sekolah. Indeks pendidikan merupakan rerata berbobot (weighted average) indeks melek huruf orang dewasa dan partisipasi kasar sekolah: dua pertiga bobot diberikan kepada melek huruf orang dewasa, satu pertiga bobot diberikan kepada partisipasi kasar gabungan.

- 3) Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf orang dewasa) + $\frac{1}{3}$ (indeks partisipasi kasar)
- 4) Hitung indeks PDB dengan cara, indeks PDB dihitung dengan logaritma per kapita PDB (PPP US\$) yang disesuaikan. Penyesuaian dilakukan dengan pertimbangan bahwa guna mencapai tingkat pembangunan manusia yang layak tidak dibutuhkan pendapatan yang tidak terbatas.
- 5) Setelah menghitung indeks-indeks dimensi, selanjutnya hitung IPM sebagai rata-rata biasa ketiga indeks dimensi tersebut, dengan rumus: $HDI = \frac{1}{3}$ (indeks harapan hidup) + $\frac{1}{3}$ (indeks pendidikan) + $\frac{1}{3}$ (indeks PDB) Untuk mengetahui kategori tinggi rendahnya nilai IPM, terdapat empat kriteria sebagai berikut: a) Rendah apabila nilai IPM kurang dari 50. b) Menengah Bawah apabila nilai IPM berada diantara 50 sampai kurang dari 66. c) Menengah Atas apabila nilai IPM berada antara 66 sampai kurang dari 80. d) Tinggi apabila nilai IPM lebih atau sama dengan 80. Apabila suatu daerah memiliki IPM yang kategorinya rendah, maka pembangunan manusia daerah tersebut memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga apabila suatu daerah memiliki IPM pada kategori menengah hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas sumber daya manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.

3. *Physical Quality Life Index (PQLI)*

Physical Quality of Life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat untuk menyempurnakan gambaran kesejahteraan masyarakat dengan tidak hanya menggunakan indikator makro ekonomi digunakan dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks

ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Seperti dikemukakan di atas, variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan memengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, index ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita dan HDI sebagai ukuran kuantitas manusia. Indeks mutu hidup atau Physical Quality Life Index disingkat PQLI merupakan indeks gabungan dari 3 indikator utama, yaitu: 1) Angka harapan hidup pada usia satu tahun 2) Angka kematian 3) Tingkat melek huruf. Masing-masing indikator tersebut dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, dimana nilai 1 merupakan kinerja terjelek dan nilai 100 merupakan kinerja terbaik. Jika kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 – 100 untuk masing-masing indikator tersebut, maka indeks kompositnya dapat dihitung dari rata-rata penilaian atas ke 3 indikator dengan memberikan bobot yang sama untuk masing-masing indikator (Morris D. Morris dalam Mudrajat K, 1997).

D. LATIHAN SOAL

Agar lebih memperdalam pemahaman saudara mengenai materi diatas, kerjakanlah Latihan berikut ini :

1. Sebutkan Indikator pembangunan ekonomi dalam paradigma baru !
2. Sebutkan tiga pendekatan konseptual untuk mengukur kualitas hidup manusia!
3. Jelaskan mengenai IPM, Indeks kualitas hidup dan Indeks mutu hidup (PQLI)!

BAB VII PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN (SDGS)

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB VII
PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN (SDGS)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Bahan Kajian	Waktu Belajar
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDGs)	1. Teori Konsep Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan (SDGs)	2x45 Menit

B. PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN (SDGS)

Pembangunan yang hanya bertumpu pada aspek ekonomi saja telah menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memerhatikan pelestarian lingkungan menyebabkan masalah lingkungan yang nyata seperti: rusaknya hutan, perusakan tanah dan lahan, pengurangan keanekaragaman hayati, serta makin langkanya air. Degradasi lingkungan akan menurunkan kualitas hidup manusia, menurunkan produktivitas dan pada akhirnya akan menyusutkan laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu konsep pertumbuhan berkesinambungan yang ramah terhadap lingkungan merupakan salah satu definisi yang paling fundamental dalam pembangunan ekonomi sendiri (Todaro,2000).

C. KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN (SDGS)

Paradigma pertumbuhan atau ekonomi murni memandang pembangunan nasional identik dengan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai, fungsi saving ratio, capital output ratio dan strategi investasi. Peranan pemerintah dalam hal ini, adalah memperbesar saving ratio setinggi-tingginya, dan menekan capital output ratio, untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang

setinggi-tingginya. Paradigma ini sangat berorientasi pada produksi, fokus dan prioritas utamanya adalah pada growth generating sektors. Mekanisme pasar menjadi tumpuan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Paradigma ini telah membawa banyak negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara ke dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun dalam realita keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah membawa berbagai akibat yang negatif.

Tujuan pembangunan dapat dicapai namun dibarengi dengan pengorbanan (at the expense) deteriorasi ekologis, penyusutan sumber alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi. Kritik-kritik tajam, ditujukan pada paradigma ini. Sejumlah pemikir di Massachusetts Institute of Technology dan Club of Rome, misalnya memperingatkan bahwa kalau laju pertumbuhan/pembangunan dunia dan pertambahan penduduk dunia tetap seperti ini, maka pada suatu ketika akan tercapai batas ambang (tresh-old) pertumbuhan, dan akan terjadi kehancuran planet bumi sebagai suatu sistem. Mereka berpendapat bahwa dalam satu abad, batas ambang pertumbuhan akan tercapai. Pandangan yang dapat kita kategorikan sebagai Neo Malthusian Perspective ini pada hakikatnya mengajukan teori tentang integrasi jangka panjang antara penduduk, sistem ekonomi dan sumber alam. Cendekiawan MIT dan Club of Rome mengajukan bahwa pada hakikatnya kita telah menemukan landasan pemikiran untuk berkembang dari perspektif ekologi yang kemudian dikenal dengan pemikiran tentang sustained development, atau pembangunan berkelanjutan. Namun kritik juga datang dari para pendukung paradigma pembangunan lain, yang melihat bahwa paradigma pertumbuhan cenderung menciptakan efek negatif tertentu yang akibatnya menurunkan derajat keberlanjutan pembangunan.

Kedua kritik terhadap pembangunan yang berorientasi pada pembangunan pertumbuhan pada akhirnya melahirkan saran dalam bentuk diintegrasikannya sustainability atau keberlanjutan sebagai salah satu tujuan yang harus direalisasi melalui proses pembangunan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi pergeseran orientasi pembangunan dari orientasi pertumbuhan ke orientasi pembangunan yang lain, seperti orientasi kesejahteraan, neo-ekonomi, humanizing, dan lain-lain. Namun dari apa yang diuraikan di atas tadi juga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan penekanan dalam interpretasi konsep sustainability. Interpretasi pertama lahir dari pemikiran kaum environmentalist yang lebih menekankan perhatian pada efek pembangunan pada "word system", atau planet bumi kita, dan menghendaki agar interaksi antar manusia dan lingkungannya dalam proses pembangunan memerhatikan

berkelanjutan pembangunan dan kelangsungan "word system". Sedangkan interpretasi kedua menekankan perlunya dalam interaksi antara manusia dan proyek, memerhatikan profecty sustainability

(Moelyarto, 1996). Konsep sustainability yang dicetuskan oleh kaum environmentalist berawal pada sikap keprihatinan mereka terhadap konsekuensi jangka panjang dari adanya tekanan yang ekseksif terhadap daya dukung alami (natural support system). Pembangunan Berkelanjutan (suistanable development) merupakan idealisme yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis jangka panjang tetapi juga kelestarian lingkungan hidup yang tidak ternilai harganya. Hal ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien. Pembangunan berkelanjutan juga memerhatikan keberlanjutan pemanfaatannya tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang. Dalam Brundtland Commission Report yang berjudul Our Common Future (Djaja diningrat, 1990.p.3) dijelaskan batasan sustainable development sebagai berikut: "Sustainable development is defined as development that meet the needs of the present Without compromising the ability of future generation to meet their own needs" Sustainable development atau pembangunan berlanjutan ini mungkin diwujudkan melalui keterkaitan (interleinkages) yang tepat antara alam, aspek sosio ekonomis, dan kultur.

Sustainable development bukanlah suatu situasi harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan proses perubahan dimana, eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat ini dan masa datang. Demikian pula, perkembangan penduduk perlu diperhatikan dalam mencapai keberlanjutan pembangunan, karenanya jumlah dan perkembangan penduduk haruslah dalam keseimbangan dengan perubahan potensi produksi ecosystem (Djajadiningrat, 1990,p.4).

Interpretasi lain sustainable development didorong oleh adanya kenyataan banyaknya bermunculan proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Alokasi input yang berkesinambungan tidak menjamin proyek pembangunan itu berkembang dengan kekuatan sendiri. Dalam konteks ini, sustainable development dapat diartikan sebagai "The ability of development project to generate sufficiently a net surplus as input fusther development". Kedua interpretasi di atas menunjukkan hubungan yang optimal antara input dan output. Perbedaannya nampaknya terletak pada level of analysis-nya Interpretasi pertama lebih pada derajat makro, dan

interpretasi kedua pada derajat mikro. Berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dengan memerhatikan keberlanjutan pemanfaatannya untuk generasi saat ini dan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia pada masa mendatang. Konsep yang melihat pembangunan tidak hanya pada sisi ekonomi tetapi juga pada sisi sosial dan lingkungan hidup, hingga kini belum berhasil diterapkan di Indonesia. Selama ini boleh dibilang pembangunan hanya dilihat pada sisi ekonomi saja, sehingga lingkungan hidup semakin rusak. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena justru akan mengakibatkan kemunduran pembangunan. Konsep pembangunan ini bertumpu pada tiga pilar utama yaitu: pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan dan sosial budaya.

Ketiga pilar tersebut harus berjalan seimbang dan tidak terfokus pada salah satu faktor saja. Pada dasarnya istilah berkelanjutan mengacu pada pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi di masa datang. Kualitas air, udara, tanah dan kesediaan sumber daya yang lain harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi di masa datang. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan pada dasarnya telah terakomodasi dalam GBHN: "Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memerhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan ini bertujuan membangun kualitas SDM yang mampu menyelaraskan tanggung jawab moral dengan strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini perlu ditegaskan mengingat adanya kecenderungan gaya hidup konsumtivisme, hingga bergesernya potensi fisik alami manusia akibat meluasnya pemanfaatan perangkat teknologi dalam proses pembangunan.

Tujuan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan :

D. TUJUAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Ada 17 Tujuan ekonomi berkelanjutan dalam SDGs:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
- 3) Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
- 4) Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- 6) Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
- 7) Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
- 8) Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
- 10) Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
- 11) Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
- 12) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- 13) Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- 14) Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, Samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
- 15) Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
- 16) Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level
- 17) Menkuatkan kuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

E. LATIHAN SOAL

Agar lebih memperdalam pemahaman saudara mengenai materi diatas, kerjakanlah Latihan berikut ini :

1. Jelaskan Mengenai konsep ekonomi berkelanjutan!
2. Sebutkan 17 Goals dalam SDGs!

BAB VIII SUMBER DANA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI

BAB VIII
SUMBER DANA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Bahan Kajian	Waktu Belajar
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sumber Dana Untuk Pembangunan Ekonomi	1. Deskripsi tentang Teori Sumber Dana untuk Pembangunan Ekonomi	2x45 Menit

B. SUMBER DANA UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang. Beberapa pengertian terkait dengan APBN adalah sebagai berikut: 1) Kapasitas Fiskal (Resource Envelope) adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara yang meliputi Belanja K/L dan Belanja Non K/L. 2) Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan untuk Belanja K/L sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja K/L (renja K/L) dan Belanja non-K/L. Pagu indikatif ini mengindikasikan kebutuhan angka dasar bagi pendanaan sasaran kinerja dan kebijakan yang masih berlanjut dan indikasi jumlah tambahan untuk mendanai inisiatif baru. Pagu Indikatif ditetapkan dengan Surat Bersana (SB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas pada bulan Maret tahun sebelumnya. 3) Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada K/L untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L) dan kepada Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menyusun Rencana Dana Pengeluaran (RDP) BUN. Pagu Anggaran ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan

kepada seluruh K/L pada bulan Juni tahun sebelumnya. 4) Alokasi Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada K/L dan BUN berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan Pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan DPR. 5) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) adalah rancangan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disusun dan disepakati oleh Pemerintah untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditetapkan. 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan paling lambat akhir bulan November tahun sebelumnya. 7) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) adalah rancangan perubahan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara sebagai akibat dari perubahan pada:

(a) besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro; (b) pokok-pokok kebijakan fiskal; (c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran; dan (d) keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang diajukan ke DPR untuk ditetapkan. 8) APBNP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara sebagai akibat dari perubahan pada: (a) besaran-besaran asumsi dasar ekonomi; makro (b) pokok-pokok kebijakan fiskal; (c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran; dan (d) keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang disetujui oleh DPR. 9) Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja selain yang telah dicantumkan dalam prakiraan maju, yang berupa program, kegiatan, keluaran, dan/atau komponen. Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada tiga kesempatan dalam siklus perencanaan dan penganggaran, yaitu: a. Sebelum Pagu Indikatif (pengusulan I) di bulan Januari/Februari; b. Sebelum Pagu Anggaran (pengusulan II) di bulan Mei/Juni; c. Sebelum Alokasi Anggaran (pengusulan III) di bulan Agustus /September.

C. STRATEGI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur untuk

memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerjasama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi risiko yang proporsional. Implementasi skema ini, diatur dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Untuk mendukung penerapan KPBU di Indonesia, Kementerian Keuangan melakukan inovasi pembiayaan infrastruktur dengan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah, yaitu fasilitas penyiapan proyek, dukungan kelayakan, dan penjaminan infrastruktur. Kementerian Keuangan juga memperkenalkan skema pengembalian investasi proyek KPBU yakni skema Pembayaran Berdasarkan Ketersediaan Layanan atau yang biasa dikenal dengan Availability Payment atau AP. Beberapa kelebihan skema AP ini antara lain, tidak adanya risiko permintaan atau demand risk bagi Badan Usaha dan kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha. Demi mendukung terlaksananya penerapan KPBU dan lahirnya proyek-proyek baru yang berfokus kepada layanan publik, Kementerian Keuangan juga mendirikan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPPI) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Direktorat PDPPPI menjalankan peran untuk mengelola pemberian fasilitas dan dukungan pemerintah, serta memfasilitasi PJPK dalam menyiapkan dan melakukan transaksi proyek KPBU. Dukungan ini merupakan bentuk kerja nyata upaya Pemerintah Indonesia untuk mendukung dan memperkuat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta dan pemerintah demi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

D. PEMBIAYAAN INVESTASI NON ANGGARAN PEMERINTAH (PINA)

PINA adalah Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah yang menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial dan berdampak untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. PINA penting untuk dilaksanakan sebab ruang fiskal anggaran pemerintah sangat terbatas akibat adanya pembatasan lebar defisit anggaran. Kebutuhan investasi infrastruktur sangatlah besar sehingga anggaran pemerintah difokuskan untuk infrastruktur yang tidak dapat dikelola secara komersial (*filling the gap*). Dengan skema PINA, pembangunan infrastruktur dan noninfrastruktur yang membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dapat dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Skema PINA melengkapi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

PINA bertujuan untuk: • mendukung pencapaian target pembangunan nasional; • memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dalam negeri; • melakukan konsolidasi dana jangka panjang; • meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional; • menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik; • mengoptimalkan kontribusi Penerima Modal dan Penanam Modal terhadap proyek-proyek pembangunan Indonesia; dan • meningkatkan kapasitas pembiayaan investasi melalui optimalisasi aset untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Sumber pembiayaan PINA tidak menggunakan anggaran pemerintah, melainkan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang berasal dari:

1. Penanaman Modal, merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Dana Kelolaan, merupakan dana yang dikelola oleh sebuah perusahaan investasi untuk sejumlah investor
3. Perbankan, merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
4. Pasar Modal, merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
5. Asuransi, merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
6. Lembaga Pembiayaan, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
7. Lembaga Jasa Keuangan lain, termasuk pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.

8. Pembiayaan Lain yang Sah.

E. LATIHAN SOAL

Agar lebih memperdalam pemahaman saudara mengenai materi diatas, kerjakanlah Latihan berikut ini :

1. Jelaskan mengenai sumberdana pembiayaan ekonomi?
2. Jelaskan sumber pembiayaan lain yang merupakan Non anggaran pemerintah?

BAB IX PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

EKONOMI PEMBANGUNAN

BAB IX
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Bahan Kajian	Waktu Belajar
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Deskripsi tentang Perencanaan Pembangunan Nasional	2x45 Menit

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Perencanaan Pembangunan Nasional telah mempunyai landasan yang jelas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat dengan (SPPN). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Asas dan Tujuan a. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. b. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. c. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara. d. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: 1) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) Menjamin tercapainya penggunaan

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Nasional meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-undang, sedangkan untuk RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan progra Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra -SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-KL

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

C. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: 1) Penyusunan rencana; 2) Penetapan rencana; 3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) Evaluasi pelaksanaan rencana. b. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: 1) Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; 2) Musyawarah perencanaan pembangunan; dan 3) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. c. Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan: 1) Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; 2) Penyiapan rancangan rencana kerja; 3) Musyawarah perencanaan pembangunan; dan 4) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. d. Musyawarah Rencana Pembangunan: 1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur

penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional, dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. 2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. 3) Menteri menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional. 4) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

D. SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup: 1) Sasaran Makro; 2) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 3) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan; 4) Sasaran Dimensi Pemerataan; 5) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah; 6) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

- a) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
- b) Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai

tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.

- c) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah Swasta.
- d) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- e) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.
- f) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang

pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

- g) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

E. LATIHAN SOAL

Agar lebih memperdalam pemahaman saudara mengenai materi diatas, kerjakanlah Latihan berikut ini :

1. Jelaskan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional!
2. Bagaimana tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan!

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Turkey: Crown Publishers.
- Alesina, A., & Rodrik, D. (1994).
- BPS. 2020. Badan Pusat Statistik Diakses Tanggal 20 Oktober 2022
- Characteristic of Human Development: Socio-economic Dimension. *KnE Social Sciences*, 865-874. Hasan, M., Alim, A. M. S., Alfiani, A. S. M., Sachrir, M. I., Shafar, M. R., Hanim, N. F., ... & Audia, S. R. (2020).
- Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN. Pendidikan Kewarnegaraan / disusun oleh: Sunarso...(et al:),---Ed.1, cet A,--- Yogyakarta: UNY Press/2006, 305 hlm; 16 x 20.5cm
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat, 2017. Struktur APBD Kabupaten Pakpak Bharat 2017, www.pakpakkab.go.id Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017.
- Distributive Politics and Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 109(1), 465–490. Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011).
- Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur, Jakarta. Ditjen Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Potensi Infrastruktur Tahun 2017 Bidang PUPR*, 2017. Jakarta.
- Estimasi Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pertanian*, 1(2), 21- 34. Dinar, M., & Hasan, M. (2018).
- Hadi Prayitno dan Budi Santosa. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Irawan dan M. Suparmoko. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Kementerian Keuangan, 2014. *Pokok-pokok Siklus APBN di Indonesia*, Jakarta. Kementerian Keuangan, 2017. *Postur APBN 2017*. www.kemenkeu.go.id Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2014.
- Konsep dan Implikasi. dipresentasikan pada 25 Februari 2011, Jurusan Manajemen dan kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Tidak diterbitkan.
- Konsep dan Implikasi. dipresentasikan pada 25 Februari 2011. Jurusan Manajemen dan kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: Tidak diterbitkan.
- Lincoln Arsyad. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Masykur Wiratmo. 1992. *Ekonomi Pembangunan, Ikhtisar Teori, Masalah dan Kebijakan*, MW Mandala, Yogyakarta.

- Our Common Future, World Commission on Environment and Development. United Nations: Oxford University Press. Hasan, M., & Annur, F. I. (2016).
- Pedoman Pola Pembiayaan Investasi Infrastruktur dan Optimalisasi Aset Bidang PUPR, Jakarta. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (DJPRR), 2016.
- Pembangunan Dilema dan Tantangan; Yogyakarta: Pustaka pelajar Mudrajat Kuncoro. 2010.
- Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. Makassar: CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu. Hasan, M. (2018).
- Pendidikan untuk Semua: Pembangunan dan Pendidikan dalam Perspektif Ideologi-ideologi Pendidikan. In Prosiding Seminar Nasional Administrasi Pendidikan & Manajemen Pendidikan (pp. 10- 17). Hasan, M. (2019).
- Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi. Makassar: CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu. Hasan, M., & Azis, M. (2018).
- Poor Economics: Rethinking Poverty & the Ways to End it. India: Random House. Bourguignon, F. (2017).
- Sadono Sukimo. 2010. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana. Siagian. 1994.
- Sakernas. Jakarta:BPS Djajadiningrat, Surna T, Population and Development for a Sustainable Future, paper presented in the Seminar "World Without Borders", July 18-22, 1990, Yogyakarta. Ginanjar Kartasasmita. 1994.
- Stiglitz, Sen and Fitoussi. Social Indicators Research. Vol. 102, No. 1, NATIONAL AND PERSONAL WELLBEING: MEASURING THE PROGRESS OF SOCIETIES, ISQOLS IX, FLORENCE (May2011), pp. 117-129 Todaro, Michel P. 2006. Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Strategi Pendayaagunaan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN dan BUMD) dalam Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Jakarta. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2016.
- Teori-Teori Pembangunan Ekonomi. Bandung: Media Sains Indonesia. Hasan, M., Dinar, M., Rijal, S., Rahmatullah, Inanna, Arisah, N. (2020). Sejarah Pemikiran Ekonomi. Bandung: Media Sains Indonesia.
- The Globalization of Inequality. New Jersey: Princeton University Press. Brundtland, G. H. (1987).